

ISSN: 2087-7900

● JURNAL  
**POLITICA**

DINAMIKA MASALAH POLITIK DALAM NEGERI & HUBUNGAN INTERNASIONAL

VOL. 5 NO.1, JUNI 2014

**Penanggung Jawab:**

Kepala P3DI (Dr. Rahaju Setya Wardani)  
Kepala Bidang Pengkajian P3DI (Ety Tiyastuti)

**Pemimpin Redaksi:**

Prof. Dr.phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

**Dewan Redaksi:**

Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si.  
Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.  
Riris Katharina, S.Sos., M.Si.  
Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.  
Drs. Ahmad Budiman, M. Pd.

**Sekretaris Redaksi:**

Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

**Staff Redaksi:**

Musbiyatun, Panji Fitrianto

**Mitra Bestari:**

DR. Lili Romli, M.Si.  
DR. Ganewati Wuryandari, MA.

**Alamat Redaksi/Tata Usaha :**

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)  
Setjen DPR RI, Gedung Nusantara I, Lt. 2  
Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, 10270  
Telp : 021-5755987 Fax : 021-5756067  
Email : jurnal.politica@yahoo.com

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain.  
Naskah diketik sesuai dengan format yang tercantum pada halaman belakang  
(Lihat pedoman penulisan)

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Abstrak.....	vii
Urgensi Sistem Siaran Televisi Berjaringan <i>oleh: Ade Armando</i> .....	1-16
LSM Internasional dan Dilema Pelestarian di Hutan Harapan Provinsi Jambi <i>oleh: Adirini Pujayanti</i> .....	17-36
Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya <i>oleh: A. Muchaddam Fahham dan A.M. Kartaatmaja</i> .....	37-60
Penataan Lembaga Penyiaran Komunitas dalam Akvitas Penyiaran di Indonesia <i>oleh: Ahmad Budiman</i> .....	61-77
Pemerintahan Desa: “Unit Pemerintahan Palsu” dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (Kasus Desa Jabon Mekar, Parung, Kabupaten Bogor) <i>oleh: Hanif Nurcholis</i> .....	79-94
Cyber-security dan Tantangan Pengembangannya di Indonesia <i>oleh: Handrini Ardiyanti</i> .....	95-110
Biodata Penulis	
Pedoman Penulisan	



## PENGANTAR REDAKSI

*Jurnal Politica*, sebagai jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI, merupakan wadah bagi para peneliti dan masyarakat akademis untuk menyampaikan ide dan/atau gagasan yang terkait dengan dinamika politik dalam dan luar negeri. Memasuki Volume ke-lima tahun 2014, *Jurnal Politica* secara konsisten tetap menyajikan berbagai tulisan ilmiah di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional. Berbagai persoalan strategis dibahas oleh 6 (enam) penulis dalam *Jurnal Politica*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2014 ini. Keenam persoalan strategis tersebut menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan persoalan komunikasi dan penyiaran, pemerintahan, lingkungan hidup, dan juga isu internasional.

Tulisan pertama disajikan oleh Ade Armando dengan judul “Urgensi Sistem Siaran Televisi Berjaringan”. Tulisan ini membahas permasalahan, “mengapa sistem siaran televisi berjaringan harus kembali dimasukkan ke dalam perubahan Undang-Undang Penyiaran?” Tulisan ini menyebutkan, antara lain, pemerintah sebagai pelaksana undang-undang harus dapat memahami filosofi pengaturan penyiaran di tanah air, bahwa sistem siaran televisi berjaringan merupakan sistem penyiaran yang demokratis dalam rangka mendorong partisipasi dan pemberdayaan lembaga penyiaran lokal, keberagaman isi siaran, dan perlindungan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh materi siaran. Namun jika pemerintah tunduk kepada pengusaha media penyiaran, maka pemerintah menganut sistem penyiaran neoliberal, yang menyerahkan segala sesuatunya kepada mekanisme pasar. Oleh karena itu, tulisan ini juga menyebutkan, apabila Undang-Undang Penyiaran sudah mengatur pelaksanaan sistem siaran televisi berjaringan, maka semua pihak wajib tunduk dan melaksanakan ketentuan ini. Ketentuan yang pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya praktek monopoli isi dan kepemilikan media penyiaran. Ketegasan pengaturan tentang sistem siaran berjaringan, menurut tulisan ini, memang perlu diwujudkan melalui aturan penyiaran sebagai pengganti Undang-Undang Penyiaran yang telah ada selama ini.

Tulisan kedua disajikan oleh Adirini Pujayanti dengan judul “LSM Internasional dan Dilema Pelestarian di Hutan Harapan Provinsi Jambi”. Tulisan hasil penelitian ini membahas peran LSM internasional dalam upaya penyelamatan kelestarian lingkungan, khususnya Hutan Harapan Provinsi Jambi. Tulisan ini menyebutkan, antara lain, dalam isu lingkungan hidup negara tidak bisa mengabaikan kekuatan global dan tekanan-tekanan aktor non-negara, salah satunya adalah LSM internasional. Sebagai aktor internasional non-negara, LSM, dan juga tokoh masyarakat internasional, merupakan penggerak utama yang sangat efektif dalam membangun konservasi ekosistem di Hutan Harapan. Mereka menjadi kelompok kepentingan khusus (*special interest group*) yang dalam banyak hal justru menjadi penentu arah kebijakan. Hal ini disebabkan Indonesia memang membutuhkan bantuan internasional untuk menjaga kelestarian hutannya. Namun di lain pihak, menurut tulisan ini, Indonesia masih mempunyai banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan terkait konflik agraria yang ada di kawasan Hutan Harapan, seperti tercermin antara lain dari masih adanya penolakan masyarakat terhadap program restorasi ekosistem di Hutan Harapan tersebut. Oleh karenanya, tulisan ini juga mengajukan saran agar kerja sama internasional ke depan terkait konservasi juga mempertimbangkan kebutuhan aspirasi dan hak penduduk setempat, termasuk menyelesaikan persoalan tata ruang terutama di wilayah konservasi yang selama ini masih menimbulkan konflik di berbagai daerah.

Tulisan ketiga mengangkat salah satu isu yang hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat internasional melalui judul “Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya” yang ditulis oleh A.

Muchaddam Fahham dan A.M. Kartaatmaja. Tulisan ini dimaksudkan untuk memahami konflik Suriah dari sisi isu penyebab konflik, aktor-aktor yang terlibat dalam konflik, dan dampak dari konflik tersebut bagi Suriah dan dunia internasional. Analisis tahapan dan pemetaan konflik digunakan oleh penulisnya sebagai alat bantu dalam kerangka berpikir untuk memahami permasalahan yang dibahas. Berdasarkan analisisnya, penulis mengungkapkan bahwa akar masalah penyebab lahirnya konflik di Suriah bukanlah perbedaan mazhab keagamaan antara Bashar al-Assad yang bermazhab Syi'ah Alawiyah versus para oposisi yang bermazhab Sunni. Penyebab konflik juga bukan karena pemerintah Suriah tidak demokratis, seperti yang terjadi di Tunisia, Mesir, dan Libya. Akar masalah yang menjadi penyebab konflik di Suriah adalah kepentingan politik dan ekonomi negara-negara pendukung oposisi yang menuntut penggantian rezim dan negara-negara yang mendukung Presiden al-Assad. Tuntutan penggantian regim dan pengunduran diri Presiden al-Assad merupakan pintu masuk lahirnya konflik dan perang di Suriah, yang berdampak pada jatuhnya korban jiwa dan penanganan masalah pengungsi, yang kemudian harus direspons oleh dunia internasional.

Tulisan keempat kembali menyajikan isu penyiaran dengan judul "Penataan Lembaga Penyiaran Komunitas dalam Aktivitas Penyiaran di Indonesia" yang ditulis oleh Ahmad Budiman. Tulisan ini berangkat dari persoalan bahwa Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) masih dihadapkan pada sejumlah kendala dalam mengelola kelebagaannya dan menyajikan materi penyiaran kepada masyarakat. Tulisan ini menyebutkan bahwa penataan terhadap LPK perlu dilakukan terutama terkait dengan penataan kelembagaan yang lebih profesional, peningkatan kualitas program siaran, serta penguatan regulasi yang mengatur tentang LPK. Tulisan ini juga menyebutkan bahwa penataan LPK harus ditujukan untuk tetap menjaga independensi media LPK dan hanya bekerja untuk kebutuhan komunitasnya. Penataan juga harus memberikan kesempatan kepada LPK untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah dengan memberikan kesempatan kepada LPK untuk menyosialisasikan program-program pembangunan daerah kepada masyarakatnya. LPK juga perlu diberikan kesempatan untuk mendapatkan sumber anggaran yang besar agar dapat menghasilkan program siaran yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan komunitasnya. Penguatan LPK, menurut tulisan ini, juga perlu dilakukan agar keberadaan lembaga penyiaran ini mampu bertahan dari derasnya pengaruh kekuatan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) di masyarakat.

Tulisan kelima mengangkat isu pemerintahan, tepatnya pemerintahan desa dengan judul "Pemerintahan Desa: 'Unit Pemerintahan Palsu' dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (Kasus Desa Jabon Mekar, Parung, Kabupaten Bogor)", ditulis oleh Hanif Nurcholis. Tulisan ini mengkritisi status pemerintahan desa dalam perspektif administrasi negara. Berdasarkan kajian penulisnya, pemerintah desa yang diatur oleh UU No. 32/2004 *juncto* UU No. 6/2014 adalah "*pseudo government unit*" di bawah administrasi pemerintahan kabupaten/kota. Ia bukan instansi vertikal karena kementerian pusat tidak menempakan pejabat dan infrastrukturnya di sini. Ia bukan *local self government* karena bukan unit pemerintahan di daerah yang dibentuk pemerintah pusat berdasarkan asas desentralisasi. Ia juga bukan *nongovernment organizations* karena statusnya adalah organisasi subordinat pemerintah. Akan tetapi, ia adalah lembaga negara karena dibentuk Negara melalui Undang-Undang dan melaksanakan urusan pemerintahan dari pemerintah atasan. Dampak dari status Desa yang hanya sebagai "unit pemerintahan palsu" ini diantaranya adalah, lembaga desa tidak mempunyai kapasitas menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal, karena tidak didukung oleh keberadaan pegawai yang kompeten dan infrastruktur yang memadai. Untuk itu, Desa perlu direstrukturisasi sesuai dengan amanat UUD 1945 dan TAP MPR No. IV/2000. Untuk keperluan ini perlu dilakukan penelitian mendalam atas semua desa di Indonesia.

Tulisan terakhir, atau yang keenam, berjudul “*Cyber-security* dan Tantangan Pengembangannya di Indonesia”, ditulis oleh Handrini Ardiyanti. Tulisan ini mengulas perihal keamanan dunia maya (*cyber-security*) karena melihat kenyataan bahwa tingkat kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) di Indonesia sudah mencapai tahap memprihatinkan. Salah satu fakta yang menunjukkan *cyber crime* di Indonesia sudah mengkhawatirkan adalah data CIA yang menyebutkan bahwa kerugian yang disebabkan oleh tindak kejahatan *cyber* di Indonesia telah mencapai 1,20% dari tingkat kerugian akibat *cyber crime* yang terjadi di dunia. Untuk menyikapi *cyber crime* yang sudah mencapai tahap memprihatinkan tersebut maka salah satu alternatif kebijakannya, menurut tulisan ini, adalah dengan menempatkan *cyber-security* dalam konteks pertahanan. Hal ini dikarenakan penanganan *cyber-security* yang serius membutuhkan pembangunan infrastruktur penunjang diantaranya satelit khusus untuk pertahanan, termasuk di dalamnya kerja penanganan *cyber-security*, mengingat telah dimilikinya sejumlah provider telekomunikasi di Indonesia oleh pemilik modal asing. Tulisan ini menyarankan, *cyber-security* ke depan hendaknya dibangun dan dikembangkan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, guna melindungi infrastruktur telekomunikasi dan *cyber* di Indonesia dari situasi kritis.

Demikian pengantar atas enam tulisan yang tersaji dalam *Jurnal Politica* edisi kali ini. Berbagai tulisan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan juga alternatif pemikiran bagi para pembaca yang menaruh perhatian terhadap isu-isu yang dibahas dalam jurnal ini. Sebagai sebuah kajian, redaksi juga berharap agar tulisan-tulisan ini dapat menjadi referensi bagi yang membutuhkan terutama para pengambil kebijakan. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada Dr. Lili Romli, M.Si. dan Dr. Ganewati Wuryandari, Peneliti Utama pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, sebagai Mitra Bestari, atas koreksi dan masukannya terhadap semua tulisan dalam *Jurnal Politica* edisi kali ini.

Jakarta, Mei 2014

Redaksi



Kata Kunci bersumber dari artikel  
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Ade Armando

Urgensi Sistem Siaran Televisi Berjaringan

Sistem siaran televisi berjaringan sesungguhnya merupakan bentuk tanggungjawab dari media penyiaran yang telah menggunakan spektrum frekuensi radio. Sistem siaran televisi berjaringan merupakan sistem siaran di mana lembaga penyiaran induk yang memancarluaskan siarannya ke beberapa atau banyak wilayah siar melalui lembaga penyiaran lokal secara tetap pada jam siaran tertentu. Sistem siaran televisi berjaringan berangkat dari pemikiran sistem penyiaran yang demokratis dalam rangka mendorong partisipasi dan pemberdayaan lembaga penyiaran lokal, keberagaman isi siaran, dan perlindungan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh materi siaran.

Kata Kunci: Sistem siaran, televisi berjaringan, UU penyiaran, lembaga penyiaran lokal, sistem penyiaran

Ade Armando

*The Urgency of TV Broadcasting System Using Networking*

*The existence of TV broadcasting system using networking is a consequence of responsibility of broadcasting media which uses the spectrum of radio frequency. It further reveals that in the system, its main institution disseminates its broadcasting to several or many regions through its local institution, regularly, in a specific schedule. This system is developed from a democratic broadcasting principle in order to encourage participation and empowerment of local television and to guarantee the variety of its content, while simultaneously protect the rights of public to have access to the content.*

*Keywords: Broadcasting system, television networking, law on broadcasting, local television, broadcasting system*



Kata Kunci bersumber dari artikel  
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Adirini Pujayanti

LSM Internasional dan Dilema Pelestarian di Hutan Harapan Provinsi Jambi

Tulisan ini membahas tentang upaya pelestarian lingkungan oleh LSM internasional di Indonesia. Melalui kemitraan global yang diamanatkan oleh KTT Bumi di tahun 1992, semua pihak diharapkan dapat berperan penuh untuk berperan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Deforestasi kawasan hutan tropis di Pulau Sumatera telah menjadi perhatian dunia. Kondisi tersebut mendorong LSM internasional untuk melakukan konservasi di kawasan Hutan Harapan Provinsi Jambi yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati cukup tinggi. Upaya menjadikan kawasan Hutan Harapan sebagai kawasan konservasi ekosistem berhasil dilaksanakan namun mendapatkan tanggapan pro dan kontra.

Kata kunci: LSM internasional, pelestarian lingkungan, hutan harapan

Adirini Pujayanti

*International NGOs and Conservation Dilemma in Hope Forest in The Jambi Province*

*This paper discusses the environmental conservation efforts by international NGOs in Indonesia. Through a global partnership mandated by the Earth Summit in 1992, all parties are expected to involve a full role to play as well as top reserve the environment. Deforestation in the tropical forests in Sumatera has attracted global great attention. This condition has encouraged international NGOs to carry out conservation in the area of the Hope Forest in the Province of Jambi which has a fairly high level of biodiversity. However, this effort has gained pros and cons.*

*Keywords: International NGOs, environmental conservation, hope forest*

Kata Kunci bersumber dari artikel  
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

A. Muchaddam Fahham dan A. M. Kartaatmaja

Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya

Meskipun telah berlangsung selama empat tahun, hingga saat ini, konflik Suriah belum tampak akan berakhir. Sejak Maret 2011 konflik ini telah menelan korban yang tidak sedikit, ribuan pengungsi, dan ribuan anak menjadi yatim akibat kehilangan orang tua mereka. Ribuan rumah, infrastruktur dan sarana publik hancur. Tulisan ini berupaya memahami akar persoalan yang menjadi penyebab konflik Suriah, siapa aktor kunci yang terlibat dalam konflik, dan dampak konflik itu bagi Suriah dan dunia internasional. Data-data tentang konflik Suriah dikumpulkan dari buku, jurnal, dan web. Data-data tersebut kemudian dikategorisasi, disistematisasi dan dianalisis sesuai dengan tujuan penulisan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa sumber masalah atau penyebab lahirnya konflik Suriah bukanlah perbedaan mazhab keagamaan melainkan kepentingan politik dan ekonomi dari oposisi penentang Assad dan negara-negara pendukung oposisi, ada tiga aktor yang berperan dan terlibat dalam konflik, Presiden Bashar al-Assad dan para pendukungnya, oposisi Suriah, dan kelompok Jihadis. Dampak konflik bagi Suriah jatuhnya korban jiwa dan pengungsi. Sejak meletusnya konflik pada Maret 2011 sampai dengan April 2013 jumlah korban meninggal sebanyak 150.000 jiwa. Sementara warga yang mengungsi sebanyak 2.4 juta orang, 3/4 di antara pengungsi itu adalah anak-anak dan perempuan. Sekitar 4 juta warga Suriah yang kehilangan tempat tinggal dan tetap bertahan di Suriah sampai sekarang. Bagi dunia internasional, konflik Suriah berdampak dalam penanganan pengungsi.

Kata Kunci: Syi'ah, sunni, al-Qaeda, perang sipil, pengungsi

A. Muchaddam Fahham dan A. M. Kartaatmaja

*Syria Conflict: Its Roots and Impacts*

*Syrian conflict seemed to be an endless war, which has claimed more lives of civilians, causing thousand seeking refuge and children losing their parents. Since March 2011, a large number of houses, infrastructure, and public service are devastated. This article describes the cause of the conflict, the actors, and the impacts of the continuity of the civilian war to Syria and international community. The writers conclude that conflict was not caused by sectarian factors, but political and economic interests of opposition groups and their supporting countries. There were three major warring parties, namely President Bashar and his loyalists, Syrian opposition group, and the jihadists. While, the number of refugees has reached 2.4 million, 75% of them are women and children, and there are also 4 million internally displaced people.*

*Keyword: Syi'ah, sunni, al-Qaeda, civil war, refugees*

Kata Kunci bersumber dari artikel  
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Ahmad Budiman

Penataan Lembaga Penyiaran Komunitas dalam Aktivitas Penyiaran di Indonesia

Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan salah satu penyelenggara penyiaran yang ada di Indonesia. Kegiatannya tidak komersial dan didirikan oleh komunitas tertentu. Komunikannya yang loyal dan daya jangkau frekuensinya yang terbatas, menyebabkan program siarannya fokus pada informasi, pendidikan dan budaya komunitasnya. Kendala operasionalnya yaitu ijin penyelenggara penyiaran yang sulit didapatkan, anggaran dan kualitas program siaran yang terbatas. Penataannya dimaksudkan memaksimalkan kemanfaatan lembaga penyiaran ini bagi masyarakat. Penataan yang perlu dilakukan terkait dengan dasar hukum kelembagaan, sumber anggaran, ketersediaan dan daya jangkau frekuensi, serta peningkatan kualitas program siaran.

Kata kunci: Lembaga penyiaran komunitas, LPK, penyiaran, frekuensi siaran, program siaran

Ahmad Budiman

*Managing Community Broadcasting Agency in Broadcasting Activities in Indonesia*

*Community Broadcasting Agency (LPK) is one of several agencies of broadcasting existing in Indonesia today. Its activity is not commercial in nature, and it is created by certain groups of community. Its loyal users and limited frequency capacity cause its program focus only on issues of information, education and culture of its community. Some operational problem facing by the LPK are difficulty in obtaining broadcasting license, as well as limited budget provided by the state to support its activity, and also the quality of program. The new approach is intended to maximize the functions of this community broadcasting for public. Away from this, the new approach is perceived necessary for the reasons of improving its legal basis, source of budget, the availability of channels, its covering capacity, and program quality.*

*Keywords: Community broadcasting agency, LPK, broadcasting, broadcasting frequency, broadcasting programs*

Kata Kunci bersumber dari artikel  
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Hanif Nurcholis

Pemerintahan Desa: “Unit Pemerintahan Palsu” dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (Kasus Desa Jabon Mekar, Parung, Kabupaten Bogor)

Pemerintahan daerah di Indonesia terdiri atas dua lapis: provinsi dan kabupaten/kota. Di bawah kabupaten/kota terdapat Pemerintahan Desa. Awalnya, pada zaman Belanda Pemerintahan Desa dijadikan sebagai persekutuan rakyat pribumi di bawah pengaturan hukum adat. Akan tetapi, di bawah UU No. 19/ 1965 status pemerintahan desa demikian dihapus. Kemudian UU No. 5/ 1979 membentuk model pemerintahan desa baru. Dilihat dari perspektif administrasi negara, model baru tersebut memunculkan pertanyaan: apakah ia daerah otonom, wilayah administrasi, organisasi nonpemerintah, atau komunitas. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penelitian di Desa Jabon Mekar-Bogor-Jawa Barat. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui pengamatan lapangan, wawancara mendalam, kajian dokumen, dan FGD. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa Desa Jabon Mekar adalah lembaga antara lembaga masyarakat dan lembaga pemerintah. Dengan demikian, Pemerintahan Desa dalam sistem birokrasi pemerintah Indonesia adalah “unit pemerintahan palsu”.

Kata Kunci: pemerintahan desa, pemerintahan lokal, administrasi negara, UU No. 5/1979, Jabon Mekar

Hanif Nurcholis

*Rural Government: “Pseudo Local Government” in Indonesian System (the Case of Jabon Mekar, Parung, Kabupaten Bogor)*

*Rural government is the lowest level of Indonesian administrative system under regency or city and province. Its existence under the Dutch colonial era is admitted as part of the colonial government’s recognition to customary law. There was, however, a new dynamic in post-independence era, during which under Law No. 19/1965, its role was diminished, and after the enactment of law No. 5/1979, its existence has been admitted again. Using its public administration point of analysis, this paper generates question whether or not the rural government similar with local state government, local self government or non-government organization. To answer this question, the writer conducted field research in Jabon Mekar, applying observation method, combining with in-depth interview, document studies. Data was also gathered from FGD, and further analyzed by using descriptive-qualitative method. From this empirical research, the writer concludes that rural government could be considered as a pseudo-government body.*

*Keywords: village administration, village government, local government, UU No. 5/1979, Jabon Mekar*

Kata Kunci bersumber dari artikel  
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Handrini Ardiyanti

*Cyber-security dan Tantangan Pengembangannya di Indonesia*

Indonesia saat ini tengah dalam keadaan mendesak *cyber-security* atau keamanan dunia maya karena melihat kenyataan bahwa tingkat kejahatan di dunia maya atau *cyber crime* di Indonesia sudah mencapai tahap memprihatinkan. Namun berbeda dengan penanganan kejahatan lainnya, *cyber-security* membutuhkan pemikiran yang komprehensif untuk menanganinya. Karena itu tulisan ini membahas tentang bagaimana kebijakan *cyber-security* yang telah dijalankan di Indonesia selama ini dan bagaimana prospek dan tantangan bagi pengembangan kebijakan *cyber-security* di Indonesia.

Kata kunci: Kejahatan *cyber*, keamanan *cyber*, *cyber-security*, pertahanan, Indonesia

Handrini Ardiyanti

*Cyber-security and Development Challengges in Indonesia*

*Indonesia is reportedly facing a serious cyber-security threat due to the fact that the level of cyber crime in the country has reached critical condition. Unlike in coping with other crimes, to counter cyber-security, a comprehensive solutions should be found out. This paper discusses the ways of how cyber-security in the country has been handling, how its prospect, and new challenges coming from its development today.*

Keywords: *Cyber, cyber crime, cyber-security, defense, Indonesia*